

**TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS**

Fariza Indar Inayah, Retna Hanani

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (024)
7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Melung Tourism Village is one of the tourism villages in Banyumas Regency that has considerable potential for nature, education, and cultural tourism. The development of this tourism village is directed through a community empowerment approach to improve the welfare of residents in a sustainable manner. However, its implementation has not been fully optimal. The problems faced include low community participation, limited human resources, and weak local institutional capacity. These conditions indicate a gap between the potential of the tourism village and the implementation of community empowerment in the field. This study aims to describe and analyze the stages of community empowerment in the development of Melung Tourism Village, as well as to identify the driving and inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that community empowerment has been carried out through the stages of awareness, capacity building, and empowerment, but has not been optimal. The driving factors include natural resource potential, village institutional support, and policies, while the inhibiting factors include budget constraints, uneven human resource quality, limited facilities and infrastructure, and institutional capacity that is not yet independent. This study concludes that strengthening community and institutional capacity is key to the sustainability of Melung Tourism Village development.

Keywords: Community empowerment, sustainable tourism, Melung Tourism Village

ABSTRAK

Desa Wisata Melung merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi wisata alam, edukasi, dan budaya yang cukup besar. Pengembangan desa wisata ini diarahkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Permasalahan yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi desa wisata dengan implementasi pemberdayaan masyarakat di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, namun belum berjalan optimal. Faktor pendorong meliputi potensi sumber daya alam, dukungan kelembagaan desa, dan kebijakan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kapasitas kelembagaan yang belum mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan merupakan kunci keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Melung.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata Berkelanjutan, Desa Wisata Melung

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia karena mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang beragam, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa devisa pariwisata meningkat dari USD 6,78 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 14 miliar pada tahun 2023 dan mencapai USD 16,71 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan maupun besarnya pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana sektor tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dalam pembangunan daerah, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menekankan pada keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan potensi wisata.

Oleh karena itu, pendekatan *community based tourism* menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan pariwisata karena mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat lokal (Barereto & Giantari, 2015). Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki (Kuncoro, 2004).

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga menjadi fokus pembangunan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kunjungan wisatawan domestik yang tinggi. Salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata cukup besar di provinsi tersebut adalah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyumas mencapai sekitar 4,2 juta wisatawan, melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 3,4 juta wisatawan (Sumarwoto, 2024).

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi pariwisata berbasis masyarakat yang diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Salah satu desa yang berkembang sebagai desa wisata di Kabupaten Banyumas adalah Desa Melung yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng. Desa ini memiliki berbagai potensi wisata seperti wisata alam, wisata edukasi, wisata religi, serta produk lokal berupa kopi dan kerajinan bambu. Pengembangan desa wisata di Desa Melung mulai dirintis sejak tahun 2017 melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam pengelolaan objek wisata Pagubugan (Pribadi & Nastiti, 2023).

Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, pengembangan Desa Wisata Melung masih menghadapi permasalahan terkait keterlibatan dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih rendah; meskipun dilibatkan dalam forum diskusi atau rembung desa, sebagian masyarakat cenderung menjadi pendengar pasif dan belum aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun pengambilan keputusan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan tingkat pendidikan, minimnya akses informasi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata (Pribadi & Nastiti, 2023).

Permasalahan lain berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan desa wisata. Pengelolaan Desa

Wisata Melung melibatkan BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), namun masih menghadapi kendala dalam kemampuan manajerial, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan pendanaan. Sebagian besar pengurus Pokdarwis merupakan masyarakat setempat yang belum mendapatkan pelatihan profesional dalam pengelolaan pariwisata (Susanto, 2024). Selain itu, pemanfaatan Dana Desa masih lebih difokuskan pada pembangunan fisik, sehingga peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan belum menjadi prioritas utama (Budiningsih, 2019).

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Melung tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan potensi wisata, tetapi juga bergantung pada proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi tahap penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya peran kelembagaan lokal

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan pemberdayaan di Desa Wisata Melung masih belum optimal. Oleh

karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

KAJIAN TEORITIS

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Menurut Dwidjowiyoto dan Wrihatnolo (2007), tahapan pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai potensi yang dimiliki serta hak mereka untuk mengembangkan diri. Pada tahap ini masyarakat diberikan pemahaman dan motivasi agar mampu mengenali peluang yang ada di lingkungan mereka.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan merupakan proses penguatan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok agar memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dalam memanfaatkan peluang yang tersedia

3. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan tahap pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam mengelola kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada tahap ini masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan potensi yang ada di lingkungannya.

b. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Mardikanto (2013:188), faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut.:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan potensi penting yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dapat menjadi modal utama dalam proses pemberdayaan masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor

- penting dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang tersedia.
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan infrastruktur yang mendukung kelancaran kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi, serta memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat.
 4. Kelembagaan
Kelembagaan memiliki peran penting dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Keberadaan lembaga dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya, penyusunan kebijakan, serta penyediaan berbagai layanan yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 5. Organisasi dan Administrasi
Organisasi dan administrasi berfungsi sebagai sistem pengelolaan yang mengatur struktur, tujuan, serta pembagian peran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan organisasi dan administrasi yang baik akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan.

6. Kebijakan
Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menyediakan regulasi, program, pendanaan, serta fasilitas yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Lokus penelitian dilaksanakan di Desa Wisata Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Pemerintah Desa Melung, Pokdarwis Desa Melung, Bumdes Desa Melung dan Masyarakat Desa Melung.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, menggunakan sumber data primer yaitu berupa wawancara dan observasi terhadap objek penelitian, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa jurnal,

artikel, data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta analisis domain. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Melung

a. Tahap Penysadaran

Tahap penyadaran merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diberikan pemahaman mengenai potensi desa serta peluang yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pariwisata. Di Desa Wisata Melung, proses penyadaran dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, musyawarah desa, pertemuan warga, serta komunikasi informal yang melibatkan pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat mulai memahami bahwa desa mereka memiliki potensi wisata alam, budaya, dan edukasi yang dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru. Proses penyadaran juga dilakukan dengan

pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam identifikasi potensi serta permasalahan yang ada di desa. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki kesadaran untuk berperan dalam pengembangan desa wisata.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahap penyadaran di Desa Wisata Melung telah berjalan cukup baik karena masyarakat mulai memahami manfaat desa wisata dan pentingnya keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata karena sebagian masyarakat masih bersikap pasif dalam forum diskusi maupun kegiatan pengembangan desa wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyadaran masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar partisipasi masyarakat dapat meningkat secara lebih luas.

b. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan merupakan tahap yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi desa wisata. Pada tahap ini, masyarakat diberikan berbagai pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata, seperti pelatihan pengelolaan homestay, pelayanan wisatawan, pengelolaan destinasi wisata,

serta penguatan kelembagaan Pokdarwis dan BUMDes.

Pelatihan dan pendampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan kelembagaan masyarakat agar mampu mengelola desa wisata secara lebih profesional. Selain itu, kegiatan pengkapasitasan juga berfungsi untuk memperkuat peran lembaga lokal seperti Pokdarwis dan BUMDes sebagai penggerak utama dalam pengelolaan desa wisata.

Meskipun kegiatan pelatihan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengkapasitasan masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain perbedaan tingkat pendidikan masyarakat, partisipasi yang belum merata, serta keterbatasan waktu masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kapasitas masyarakat belum berlangsung secara optimal dan masih memerlukan pendampingan yang berkelanjutan.

c. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan tahap di mana masyarakat diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Pada tahap

ini, masyarakat tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam kegiatan operasional desa wisata, seperti pengelolaan destinasi wisata, pengembangan usaha ekonomi lokal, serta kegiatan promosi pariwisata.

Di Desa Wisata Melung, proses pendayaan terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, pengembangan produk UMKM lokal, serta partisipasi dalam kegiatan evaluasi program desa wisata. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata melalui forum musyawarah dan pertemuan rutin.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendayaan masyarakat masih berada pada tahap penguatan menuju kemandirian. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu masyarakat karena pekerjaan utama di sektor pertanian, ketimpangan kemampuan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam promosi wisata.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Selain tahapan pemberdayaan, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung.

a. Faktor Pendorong Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa faktor yang mendorong proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Melung antara lain potensi sumber daya alam yang melimpah, dukungan kelembagaan desa, serta adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan desa wisata.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Melung, seperti panorama alam, pertanian organik, serta potensi wisata edukasi dan budaya, menjadi daya tarik utama bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, keberadaan kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan BUMDes juga berperan penting dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan desa wisata.

Dukungan kebijakan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan landasan bagi pelaksanaan berbagai program pengembangan pariwisata serta penguatan kapasitas masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Hasil Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat proses

pemberdayaan masyarakat. Faktor tersebut antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya mandiri.

Keterbatasan sumber daya manusia terlihat dari perbedaan tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti akses transportasi, fasilitas wisata, serta infrastruktur digital, juga menjadi kendala dalam pengembangan desa wisata.

Selain itu, kapasitas kelembagaan lokal seperti Pokdarwis masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek manajemen organisasi dan administrasi. Meskipun struktur organisasi telah terbentuk, kemampuan pengelolaan administrasi dan pemanfaatan teknologi digital masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan desa wisata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung telah berlangsung melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan sesuai dengan teori Dwidjowiyoto

dan Wrihatnolo (2007). Tahap penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat secara sukarela untuk memahami potensi desa dan perannya dalam pengembangan desa wisata. Tahap pengkapasitasan dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, dan praktik langsung yang melibatkan Pokdarwis, BUMDes, pemerintah desa, pada tahap pendayaan, masyarakat diberi ruang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan evaluasi desa wisata. Meskipun proses pemberdayaan telah berjalan cukup baik, kemandirian masyarakat masih dalam tahap penguatan akibat perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan belum optimalnya pemasaran digital.

Proses pemberdayaan tersebut didukung oleh potensi sumber daya alam, dukungan kelembagaan desa, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan desa wisata. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan agar pengembangan desa wisata dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dalam tahapan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Melung, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan yang bersifat praktis dan dapat dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu, saran-saran berikut diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait yaitu:

- 1) Pemerintah desa disarankan untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai daya tarik seperti mengadakan pelatihan tentang pengelolaan wisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, sementara masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut serta menerapkan hasil pelatihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata desa.
- 2) Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan rutin yang fokus pada keterampilan praktis, seperti pembuatan produk wisata, pemasaran melalui media sosial, dan pengelolaan homestay, dengan melibatkan pemuda desa.
- 3) Penguatan Pokdarwis perlu dilakukan melalui Pelatihan dalam pengelolaan administrasi dan manajemen organisasi, sehingga Pokdarwis mampu menjalankan kegiatan wisata secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Faidlal Rahman, Made Budiarsa, Indayati Lanya, I. Made Adikampana, Tomi Agfianto (2023), *Community Empowerment in The Promotion to Support The Development of The Tourism Village in Batu, Indonesia*, Journal of Southwest Jiaotong University, 58 (2):1-14.
- Anggono, A. (2021). *Akutansi Manajemen Pada Entitas Publik*. Adanu Abimata.
- Anggraini, A. (2024). Dampak Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Bisnis*, 5(19), 71–77.
- Arida, N. S., Suryasih, I. A., & Parthama, I. G. N. (2019). Model of community empowerment in tourism village development planning in Bali. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 313(1), 12024.
- Barreto, M., Giantari, I.G.A. 2015. "Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste". E-jurnal Ekonomi Dan Bisnis. 4(11): 779.
- Budiningsih, W. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas). Skripsi IAIN Purwokerto.
- Dwidjowijoto, Nugroho, R., Wrihatnolo, & R, R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Indrianti, D. T. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(1), 13–18.
- Mubarokah, F., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA DI DESA BANJAREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN. *Journal of Management and Public Policy*, 11(3), 156 - 169.
- Naibaho, W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 1–20.
- Pribadi, I. A. P., & Nastiti, D. (2023). The Stakeholders' Collaborative Toward the Community Empowerment Based on Village Tourism in the Melung Village. *JuSS: Jurnal Sosial Soedirman*, 6(1).
- Sanmutiane, A., Hanani, R., & Santoso, R. S. (2024). ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA WONOLOPO KOTA SEMARANG. *Journal of Management and Public Policy*, 13(3), 388-411
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarwoto. (2024). *Kunjungan ke objek wisata Pemkab Banyumas turun drastis selama Nataru*. <https://jateng.antaranews.com/berita/565310/kunjungan-keobjek-wisata->

[pembkab-banyumas-turun-drastis-selamanataru#:~:text=%22Berdasarkan data hingga pertengahan Desember,juta orang%2C%22 kata Wardoyo.](#)

- Susanto, S. M. (2024, 4 November). Peran Pemdes dan Pemda penentu suksesnya desa wisata. *Suara Merdeka Banyumas*.
- Suryana. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suraji, Ruli Sumual, Piet Pusung, et al (2021) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Urongo Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal pemerintahan daerah indonesia*